

Optimalisasi Pemutakhiran Data PBB Melalui Kolaborasi Mahasiswa UNTIDAR dengan BPPKAD di Tiga Kecamatan Kabupaten Magelang

Rendi Ramadani¹, Silvia Veni², Nurul Janah³, Siti Nurlaela⁴, Vira Marinda⁵, Endah Dwi⁶, Yuliana Indah⁷, Adnan Syarif⁸, Candra Dewi⁹, Erika Maulan¹⁰

Universitas Tidar (Manajemen, Universitas Tidar, Kota Magelang, Indonesia)

Rendi Ramadani, rendi.ramadani.saputra@students.untidar.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk kerjasama antara mahasiswa Universitas Tidar (UNTIDAR) dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang yang bertujuan untuk meningkatkan pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kegiatan ini dilaksanakan di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Mungkid, Kecamatan Mertoyudan, dan Kecamatan Muntilan, dengan memanfaatkan website SiPBB Trengginas. Dalam pendekatan praktik langsung, mahasiswa berperan aktif mendampingi perangkat desa dalam proses mutasi data, pembaruan objek pajak, perbaikan data, serta pembatalan SPPT yang tidak sesuai. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi tersebut berhasil meningkatkan akurasi data PBB, efisiensi dalam administrasi pajak daerah, serta pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemutakhiran data. Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pemerintah daerah, tetapi juga memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah yang ada di lapangan.

Kata kunci: Pemutakhiran Data PBB, Kolaborasi Mahasiswa dan BPPKAD, SiPBB Trengginas

ABSTRACT

The Community Service Program (KKN) represents a collaborative effort between students of Universitas Tidar (UNTIDAR) and the Regional Revenue, Financial Management, and Asset Agency (BPPKAD) of Magelang Regency aimed at enhancing the updating of Land and Building Tax (PBB) data. This activity was carried out in three sub-districts, namely Mungkid sub-district, Mertoyudan sub-district, and Muntilan sub-district, utilizing the SiPBB Trengginas website. In a direct practice approach, students play an active role in assisting village officials with the processes of data mutation, tax object updates, data correction, and cancellation of inappropriate SPPTs. The result of this activity shows that the collaboration has succeeded in improving the accuracy of PBB data, efficiency in regional tax administration, and public understanding of the importance of data updating. This program not only provides direct benefits to the community and local government, but also provides practical experience for students in applying knowledge to solve problems in the field.

Keywords: Land and Building Tax Data Updating, Collaboration Between Students and BPPKAD, SiPBB Trengginas System

Submit: Mei 2025

Diterima: Mei 2025

Publish: Mei 2025



Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0)

1. PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. PBB menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh pemerintah daerah (Rohmah et al., 2024). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak daerah yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. PBB berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan (Ayu et al., 2022). Kecamatan Mungkid, Kecamatan Mertoyudan, dan Kecamatan Muntilan menjadi 3 kecamatan di Kabupaten Magelang yang masih perlu dilakukan optimalisasi pemutakhiran data terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Desa-desa yang berada di 3 kecamatan ini memiliki beberapa permasalahan data terkait PBB, seperti: masih adanya bidang tanah yang belum terdaftar sehingga tidak terbitnya SPPT, banyak SPPT yang masih atas nama pemilik terdahulu, masih adanya bidang tanah yang sudah terbagi namun bukti pembayarannya masih menjadi satu SPPT, dan adanya perbedaan luas tanah antara sertifikat dan SPPT. Program KKN (Kuliah Kerja Nyata) adalah sebuah bentuk pembelajaran yang berupa pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sebuah kelompok mahasiswa dengan tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa (Laia, 2022). KKN menjadi bentuk kerja nyata di lingkungan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pedesaan yang dirancang oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat memanfaatkan ilmu, mampu menganalisis kondisi masyarakat

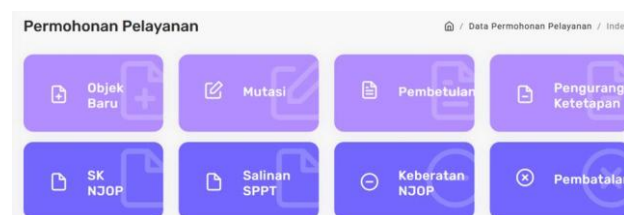
sekitar, dan memberikan solusi dalam menangani berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun politik sesuai bidang keilmuan yang dimiliki (Aliyyah et al., 2021). Pada program KKN (Kuliah Kerja Nyata), masyarakat menjadi objek utama dalam pelaksanaan KKN yang memberi bantuan pada mahasiswa yang menjalankan KKN pada desa yang menjadi tujuan KKN (Laia, 2022). Berdasarkan permasalahan yang ada terkait data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada 3 kecamatan yaitu Kecamatan Mungkid, Kecamatan Mertoyudan, dan Kecamatan Muntilan, maka Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Tidar dengan melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk melakukan optimalisasi pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui website SiPBB Trengginas. Adapun tujuan pelaksanaan KKN secara umum yaitu untuk mengamalkan, menerapkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberikan pengalaman praktis dalam penerapan teori dan praktik (Najah et al., 2024). Sedangkan adanya kegiatan KKN sebagai bentuk kolaborasi BPPKAD Kabupaten Magelang bersama mahasiswa Universitas Tidar bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memutakhirkan data PBB yang dimiliki sehingga pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam memanfaatkan pajak daerah guna memajukan pembangunan daerah.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dilaksanakan di tiga kecamatan di Kabupaten Magelang, yaitu Kecamatan Mungkid, Kecamatan Mertoyudan, dan Kecamatan Muntilan. Metode yang diterapkan adalah Praktik Langsung, yang mencakup sosialisasi dan pelatihan dasar untuk memberikan pemahaman tentang penggunaan Aplikasi SiPBB Trengginas kepada perangkat desa. Sebelum pelatihan ini berlangsung, para mahasiswa Universitas Tidar menerima Bimbingan Teknis dari Kantor BPPKAD Kabupaten Magelang mengenai penggunaan SiPBB Trengginas agar mereka dapat menerapkannya secara efektif kepada perangkat desa. Tujuan dari metode ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pemutakhiran data PBB dengan memanfaatkan Aplikasi SiPBB Trengginas di kalangan perangkat desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan KKN ini berfokus pada optimalisasi pemutakhiran data PBB melalui website SIPBB Trengginas, yang dilaksanakan melalui kolaborasi antara mahasiswa Universitas Tidar dan BPPKAD. Kegiatan ini melibatkan 40 mahasiswa yang dibagi menjadi 20 kelompok. Pembagian kelompok ini bertujuan agar dapat menjangkau wilayah setiap desa di tiga kecamatan secara efektif. Setiap kelompok beranggotakan dua orang dan memiliki tugas untuk mendampingi dan membantu perangkat desa melakukan pemutakhiran data PBB milik warga setempat. Pendampingan dilakukan pada 43 desa, 13 desa di Kecamatan Mertoyudan, 16 desa di Kecamatan Mungkid, dan 14 desa di Kecamatan Muntilan.



Gambar 1. *Jenis Pelayanan SIPBB Trengginas*

SIPBB Trengginas adalah singkatan dari Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan secara Terintegrasi, Gesit dan Tangkas. SIPBB Trengginas merupakan sebuah inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang untuk mempermudah proses pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah (www.sipbbtrengginas.magelangkab.go.id). Melalui sistem ini, proses pemutakhiran data yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi lebih mudah dan cepat dengan sistem digital. Dengan peran aktif mahasiswa dalam proses tersebut, diharapkan data PBB dapat senantiasa diperbarui dan dapat diandalkan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan. Kegiatan pemutakhiran data yang dilaksanakan mencakup berbagai aspek, seperti melakukan mutasi data akibat adanya perubahan kepemilikan atau penggunaan tanah, memperbaiki data yang tidak akurat, menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) baru untuk objek pajak yang sebelumnya belum terdaftar, pengurangan ketetapan pajak, keberatan atas NJOP PBB P2, serta pembatalan SPPT bagi objek pajak yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek pajak. Kegiatan ini membawa banyak manfaat, baik untuk mahasiswa maupun masyarakat. Melalui kolaborasi ini, mahasiswa tidak hanya membantu memastikan data yang valid, tetapi juga

memperoleh pengalaman langsung dalam penerapan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah nyata di masyarakat. Bagi mahasiswa, program ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan mereka, khususnya dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari di bidang administrasi publik, teknologi informasi, serta pengelolaan data. Selain itu, mahasiswa juga berkesempatan mengembangkan keterampilan sosial, seperti berkomunikasi, bernegosiasi, dan bekerja sama dalam tim, melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Mereka juga mendapatkan pengalaman praktis mengenai proses administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang sering kali cukup kompleks, sekaligus berperan aktif dalam memberikan solusi atas berbagai tantangan di masyarakat.



Gambar 2. Kegiatan Pendampingan

Di sisi lain, manfaat bagi masyarakat juga tidak kalah signifikan. Dengan kegiatan ini, data PBB menjadi lebih akurat dan sesuai dengan kondisi terkini. Kehadiran sistem daring membuat layanan PBB lebih mudah diakses tanpa perlu mengunjungi kantor terkait, sehingga lebih hemat waktu dan tenaga. Transparansi informasi mengenai nilai pajak yang harus dibayarkan juga meningkat, yang secara tidak langsung meminimalkan risiko kesalahpahaman. Selain itu, proses pemutakhiran data ini mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik serta pengelolaan keuangan yang lebih baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan

oleh masyarakat secara luas. Kegiatan ini dilakukan dalam dua tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Pelatihan Teknis Aplikasi SiPBB

Tahap persiapan ini pelatihan teknis mengenai aplikasi SiPBB Trengginas, dimana mahasiswa diberi bimbingan untuk menggunakan aplikasi tersebut dengan efektif agar mereka dapat membantu perangkat desa untuk melakukan pemutakhiran data SiPBB. Pelatihan ini diadakan oleh BPPKAD dengan tujuan agar para mahasiswa dapat lebih memahami tentang aplikasi SiPBB Trengginas untuk meningkatkan akurasi dan kualitas data PBB P2, serta dapat membantu perangkat desa dalam melakukan pembaruan data secara cepat, mudah, dan berkualitas. Setelah semua ini dipahami dengan baik, mahasiswa akan langsung diterjunkan ke beberapa desa di tiga kecamatan di Kabupaten Magelang.



Gambar 3. Pelatihan Dasar Aplikasi SIPBB Trengginas

2. Pendampingan pemutakhiran data SiPBB

Kegiatan pendampingan pemutakhiran data SiPBB ini dilakukan mulai dari awal November hingga akhir desember, pada kegiatan pendampingan ini mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok kemudian diterjunkan ke beberapa desa yang sudah ditentukan untuk melakukan kegiatan pendampingan pemutakhiran data SiPBB. Dalam kegiatan pelaksanaan ini dibagi menjadi beberapa tahap yaitu:

- 1) Tahap pertama yaitu melakukan kunjungan awal dan melakukan konfirmasi kepada perangkat desa mengenai adanya mahasiswa yang akan membantu dalam melakukan pemutakhiran data SiPBB di desa tersebut.
- 2) Tahap kedua, melakukan pelatihan kepada perangkat desa mengenai aplikasi SiPBB Trengginas, hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih kepada perangkat desa terkait jika sewaktu-waktu ada warga yang akan melakukan pemutakhiran data SiPBB.
- 3) Tahap ketiga, membantu perangkat desa dalam melakukan pemutakhiran data seperti mutasi, objek baru, pembetulan, pembatalan SPPT, dan berbagai permasalahan mengenai pemutakhiran data dari SiPBB, Dalam kegiatan ini mahasiswa membantu dalam pemutakhiran data dengan menyampaikan beberapa persyaratan atau berkas yang harus dipenuhi untuk melakukan pemutakhiran data SiPBB kepada perangkat desa kemudian perangkat desa dapat menyampaikan hal tersebut kepada warga desa yang ingin melakukan pemutakhiran data

SiPBB. Persyaratan yang harus dilengkapi jika akan melakukan pemutakhiran data SiPBB yaitu, SPPT Induk, KTP pihak yang bersangkutan, serta Bukti kepemilikan dari tanah atau bangunan tersebut seperti sertifikat, surat pernyataan kepemilikan, surat jual beli, dan surat pernyataan waris atau hibah. Setelah adanya persyaratan yang sudah terpenuhi maka berkas tersebut akan diinput pada aplikasi SiPBB trengginas yang kemudian akan diverifikasi oleh pihak BBPKAD, jika data telah disetujui oleh pihak BPPKAD maka pada tahun selanjutnya SPPT baru akan diterbitkan sesuai dengan data yang telah diperbarui.

Selama mahasiswa melaksanakan program KKN, terdapat beberapa evaluasi yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Pelatihan yang diberikan kepada mahasiswa ternyata masih kurang optimal, terutama karena waktu yang tersedia sangat terbatas. Akibatnya, para mahasiswa hanya menerima bimbingan yang bersifat umum, seperti cara penggunaan aplikasi dan penjelasan mengenai fitur-fiturnya. Namun, tidak semua masalah yang dihadapi di tingkat perangkat desa dapat diselesaikan hanya dengan memanfaatkan aplikasi tersebut. Contohnya, ada isu-isu yang lebih kompleks seperti keterlambatan pembayaran SPPT, warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi, serta penentuan luas tanah yang sering

kali menjadi perdebatan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pelatihan yang lebih mendalam dan komprehensif, agar mahasiswa tidak hanya memahami aplikasi, tetapi juga mampu menangani berbagai permasalahan yang nyata dan spesifik di lapangan. Dengan demikian, mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam menyelesaikan masalah yang ada di desa-desa.

2. Beberapa anggota perangkat desa tampaknya kurang aktif dalam bersosialisasi dengan warga di sekitar mereka. Hal ini berpotensi mengakibatkan minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai persyaratan yang perlu dipenuhi untuk melakukan pemutakhiran data. Ketidakaktifan dalam berkomunikasi ini bukan hanya menghambat proses pengumpulan informasi, tetapi juga dapat menciptakan kesenjangan antara perangkat desa dan warga. Oleh karena itu, sangat penting bagi perangkat desa untuk meningkatkan interaksi dengan masyarakat, sehingga mereka dapat memberikan informasi yang jelas dan lengkap. Dengan cara ini, warga akan lebih memahami langkah langkah yang perlu diambil serta pentingnya pemutakhiran data, yang pada gilirannya dapat mendukung pengembangan desa secara keseluruhan.
3. Banyaknya data mengenai warga setempat yang masih belum lengkap, seperti informasi

tentang luas tanah, tidak adanya sertifikat yang mendukung kepemilikan, serta pengelolaan warisan bagi warga yang telah meninggal, menjadi kendala yang signifikan. Situasi ini tentunya menyebabkan terjadinya pemborosan waktu yang cukup besar, karena harus menunggu hingga data tersebut dilengkapi. Keterlambatan dalam pengumpulan data ini tidak hanya menghambat proses administrasi, tetapi juga bisa mengakibatkan kesulitan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan hak kepemilikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan upaya yang lebih sistematis dalam pengumpulan dan pemutakhiran data, agar semua informasi yang diperlukan dapat tersedia dengan cepat dan akurat. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan proses administrasi di desa dapat berjalan lebih efisien dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan kegiatan ini sangat penting, mengingat dampak positif yang ditimbulkannya bagi berbagai pihak, termasuk mahasiswa, perangkat desa, kantor BPPKAD, serta masyarakat sekitar. Dari hasil evaluasi tersebut, ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk program ini, seperti memberikan bimbingan kepada mahasiswa dengan pendekatan yang lebih spesifik dan terperinci. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan lebih baik, sehingga

masyarakat menjadi lebih peduli terhadap masalah luas tanah dan sertifikat yang mereka miliki. Penting juga untuk memperbaiki komunikasi di antara semua pihak, agar tidak terjadi miskomunikasi yang dapat menghambat proses. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan program kolaborasi ini tidak hanya dapat berjalan lebih efektif, tetapi juga dapat diperluas cakupannya, tidak hanya terbatas di Kabupaten Magelang, tetapi juga menjangkau wilayah yang lebih luas. Hal ini tentu saja akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka secara keseluruhan. Dengan demikian, ke depannya, diharapkan sinergi antara semua pihak dapat terjalin dengan lebih baik, menciptakan suasana yang kondusif untuk kemajuan bersama, serta memastikan bahwa setiap individu merasa terlibat dan berkontribusi dalam pembangunan yang ada di daerah mereka.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan oleh mahasiswa UNTIDAR bersama BPPKAD Kabupaten Magelang telah berhasil meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Mungkid, Kecamatan Mertoyudan, dan Kecamatan Muntilan. Dengan memanfaatkan website SiPBB Trengginas, proses administrasi dapat dilakukan dengan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Mahasiswa tidak hanya berperan dalam membantu perangkat desa dalam pengelolaan data pajak, tetapi juga membantu meningkatkan kemampuan mereka dalam penerapan ilmu administrasi dan

teknologi informasi. Selain itu, masyarakat juga merasakan manfaat berupa kemudahan dalam mengakses informasi pajak serta peningkatan pelayanan publik dari pemerintah daerah. Hasil evaluasi menunjukkan perlunya peningkatan pelatihan teknis, sosialisasi kepada masyarakat, dan koordinasi yang lebih baik antara perangkat desa, mahasiswa, dan pihak terkait demi keberlanjutan program. Untuk meningkatkan efektivitas kegiatan serupa di masa mendatang, disarankan agar pelatihan teknis bagi mahasiswa dilaksanakan dengan lebih mendalam, sehingga mereka mampu menangani permasalahan spesifik yang muncul di lapangan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat perlu diperluas dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi agar informasi mengenai pemutakhiran data PBB lebih mudah dipahami. Di samping itu, perangkat desa diharapkan dapat lebih proaktif dalam berkomunikasi dengan masyarakat untuk memastikan kelengkapan data. Pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan untuk memperluas cakupan program ini ke wilayah lain demi mendukung pengelolaan pajak daerah yang lebih baik secara menyeluruh. Diharapkan kolaborasi yang terus ditingkatkan antara mahasiswa, perangkat desa, dan pemerintah daerah dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

REFERENSI

- Alfianti, S., Hertati, L., Syafitri, L., Munandar, A., & Hendarmin, R. (N.D.). Portal Riset Dan Inovasi Pengabdian Masyarakat (Prima) Volume 1 Issue 4 (2022) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Program Kkn Tematik Mbkm Mahasiswa

- Universitas Indo Global Mandiri.
<https://Ojs.Transpublika.Com/Ind ex.Php/Prima/> Laia, B. (N.D.). Sosialisasi Dampak Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Di Desa (Studi: Desa Sirofi).
- Aliyyah, R. R., Rahmawati, R., Septriyani, W., Safitri, J., & Ramadhan, S. N. P. (2021). Kuliah Kerja Nyata: Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Kegiatan Pendampingan Pendidikan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.v5i2.4122>
- Ayu, M., Kuswarak, K., & Ikbali, M. (2022). Penyuluhan Mengenai Pendataan dan Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kelurahan Sukadanaham. *I Com: Indonesian Community* <https://doi.org/10.33379/icom.v2i3.1902>
- Laia, B. (2022). Sosialisasi Dampak Kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Desa (Studi: Desa Sirofi). *HAGA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 78–84.
- Najah, T. S., Sari, W., Ningsih, W. G., Adisty, L., Pauzan, M. H., Irawan, R., Kamaliah, U., Pebrianti, I., Yeyen, S. S., Rifaat, H., & Hidayatulloh, R. (2024). Peran Mahasiswa KKN dalam Melaksanakan Kegiatan Khusus, Umum dan Tambahan di Desa Tahai Baru. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 155–164. <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/jb.v5i1.7201>
- Pratiwi, A. N., Lestari, D. A., Rahmayang, T., Hertati, L., Hendarmin, R., Syafitri, L., & Munandar, A. (N.D.). Portal Riset Dan Inovasi Pengabdian Masyarakat (Prima) Volume 1 Issue 4 (2022) Sosialisasi Kkn Tematik Mbkm Pendampingan Pembuatan Struktur Perhitungan Harga Pokok Produksi Guna Penentuan Harga Jual Keripik Singkong Rasa Jagung Di Desa Petanang. <https://Ojs.Transpublika.Com/Ind ex.Php/Prima/>
- Rohmah, S. N., Nuridah, S., & Sopian, S. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 3199–3210. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.4698>
- SIPBB TRENGGINAS*. Diambil <http://sipbbtrengginas.magelangkab.go.id/>
- Tulaseket, P. (2024). Sosialisasi Pentingnya Pemahaman Literasi Digital Oleh Orang Tua Kepada Anak Di Desa Lilibooi. 2, 2986–5107. <https://doi.org/10.30598/PattimuraMengabdi.2.2.212-216>